

Evaluasi Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) pada Instansi Pemerintah Berbasis E-Government

Asrul

Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

asrulhalim7@uho.com

Submit : 22 Jan 26 | Diterima : 28 Feb 2026 | Terbit : 06 Mar 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital pada sektor pemerintahan melalui penerapan *E-Government*. Implementasi *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, keberhasilan penerapan *E-Government* sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness*) pada instansi pemerintah. Kesiapan teknologi mencakup aspek infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dukungan organisasi, keamanan sistem, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan digital. Rendahnya kesiapan teknologi dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan teknologi pada instansi pemerintah berbasis *E-Government*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap aparatur sipil negara (ASN) pada beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem *E-Government*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antara variabel infrastruktur teknologi, kompetensi digital, dukungan manajemen, keamanan sistem informasi, dan kesiapan implementasi *E-Government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi, kompetensi digital aparatur, dukungan manajemen, dan keamanan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan teknologi instansi pemerintah dalam implementasi *E-Government*. Infrastruktur teknologi yang memadai dan dukungan kebijakan organisasi menjadi faktor dominan dalam meningkatkan efektivitas layanan pemerintahan digital. Selain itu, peningkatan kompetensi digital ASN juga berperan penting dalam mendukung adaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen teknologi sektor publik serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesiapan teknologi untuk mendukung implementasi *E-Government* yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Technology Readiness*, *E-Government*, Transformasi Digital, Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Transformasi digital pada sektor publik mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik atau *E-Government* guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penerapan *E-Government* memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital (Heeks, 2006).

Di Indonesia, implementasi *E-Government* menjadi bagian penting dalam agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui pengembangan sistem administrasi berbasis elektronik, aplikasi pelayanan publik digital, dan integrasi data pemerintahan. Transformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan implementasi *E-Government* tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness*) pada instansi pemerintah.

Technology readiness merupakan tingkat kesiapan individu maupun organisasi dalam menerima, mengadopsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan. Menurut Parasuraman (2000), kesiapan teknologi mencerminkan kecenderungan seseorang atau organisasi untuk menggunakan teknologi dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kesiapan teknologi mencakup kesiapan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, keamanan sistem informasi, serta budaya kerja berbasis teknologi.

Penerapan *E-Government* di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kurangnya integrasi sistem informasi, serta lemahnya keamanan data dan informasi pemerintahan (Gil-Garcia & Pardo, 2005). Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan rendahnya dukungan manajemen juga menjadi faktor penghambat dalam proses transformasi digital pemerintahan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi *E-Government*. Studi yang dilakukan oleh Carter dan Bélanger (2005) menyatakan bahwa tingkat kesiapan teknologi dan kepercayaan terhadap sistem digital menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik. Selain itu, penelitian Al-Hujran et al. (2015) menjelaskan bahwa kesiapan organisasi dan kompetensi teknologi sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan transformasi digital pada sektor pemerintahan.

Di Indonesia, implementasi *E-Government* terus berkembang, namun tingkat kesiapan teknologi antarinstansi pemerintah masih belum merata. Sebagian instansi pemerintah telah memiliki sistem digital yang terintegrasi, sementara instansi lainnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kesiapan teknologi untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mampu mendukung implementasi *E-Government* secara optimal.

Penelitian mengenai *technology readiness* pada instansi pemerintah menjadi penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan teknologi dalam penerapan *E-Government*. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan teknologi (*technology readiness*) pada instansi pemerintah berbasis *E-Government*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen teknologi sektor publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi *E-Government* di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep E-Government

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Implementasi *E-Government* memungkinkan pemerintah menyediakan layanan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan mudah. Menurut Heeks (2006), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh sektor publik untuk mentransformasi hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.

Penerapan *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) melalui sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, *E-Government* juga mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data digital.

Menurut United Nations, implementasi *E-Government* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Government to Citizen (G2C)
Pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara digital.
2. Government to Business (G2B)
Interaksi pemerintah dengan dunia usaha melalui sistem elektronik.
3. Government to Government (G2G)
Integrasi dan pertukaran data antarinstansi pemerintah.
4. Government to Employee (G2E)
Sistem layanan digital untuk aparatur pemerintah.

Keberhasilan implementasi *E-Government* sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital pemerintahan.

Technology Readiness

Technology Readiness merupakan tingkat kesiapan individu maupun organisasi dalam menerima dan menggunakan teknologi baru untuk mendukung aktivitas tertentu. Menurut Parasuraman (2000), *technology readiness* adalah kecenderungan seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, kesiapan teknologi mencakup kesiapan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia, keamanan sistem informasi, budaya organisasi, dan dukungan manajemen terhadap transformasi digital.

Parasuraman (2000) menjelaskan bahwa *technology readiness* terdiri atas empat dimensi utama, yaitu:

1. Optimism
Pandangan positif terhadap manfaat teknologi dalam meningkatkan efektivitas kerja.
2. Innovativeness
Tingkat kemampuan dan kemauan untuk mencoba teknologi baru.
3. Discomfort
Perasaan tidak nyaman atau kesulitan dalam menggunakan teknologi.
4. Insecurity
Kekhawatiran terhadap keamanan dan keandalan teknologi.

Keempat dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan teknologi suatu organisasi dalam menghadapi transformasi digital.

Infrastruktur Teknologi dalam E-Government

Infrastruktur teknologi merupakan komponen utama dalam implementasi *E-Government*. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan internet, pusat data, dan sistem keamanan informasi yang mendukung operasional layanan digital pemerintahan.

Menurut Gil-Garcia dan Pardo (2005), ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi *E-Government*. Instansi pemerintah yang memiliki sistem teknologi terintegrasi cenderung lebih mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, efisien, dan transparan.

Namun demikian, masih banyak instansi pemerintah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, terutama pada daerah yang memiliki akses teknologi dan jaringan internet yang belum optimal. Kondisi ini dapat menghambat proses transformasi digital pemerintahan.

Kompetensi Digital Aparatur Pemerintah

Kompetensi digital merupakan kemampuan aparatur pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik. Kompetensi ini meliputi kemampuan mengoperasikan sistem digital, mengelola data elektronik, menggunakan aplikasi pelayanan publik, dan memahami keamanan informasi digital.

Menurut Al-Hujran et al. (2015), kompetensi digital sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam keberhasilan implementasi *E-Government*. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi digital tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi.

Peningkatan kompetensi digital dapat dilakukan melalui pelatihan teknologi, pendidikan digital, dan pengembangan budaya kerja berbasis inovasi di lingkungan instansi pemerintah.

Keamanan Sistem Informasi Pemerintah

Keamanan sistem informasi merupakan aspek penting dalam implementasi *E-Government*. Sistem pelayanan digital pemerintah harus mampu melindungi data dan informasi publik dari ancaman keamanan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi.

Menurut Carter dan Bélanger (2005), tingkat kepercayaan terhadap keamanan sistem digital memengaruhi keberhasilan penerapan layanan *E-Government*. Semakin tinggi tingkat keamanan sistem informasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan digital pemerintah.

Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem keamanan informasi yang kuat melalui penggunaan teknologi keamanan siber, enkripsi data, dan kebijakan perlindungan data digital.

Hubungan Technology Readiness dengan Implementasi E-Government

Kesiapan teknologi memiliki hubungan erat dengan keberhasilan implementasi *E-Government*. Instansi pemerintah yang memiliki kesiapan teknologi tinggi cenderung lebih mampu mengimplementasikan layanan digital secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi digital aparatur, dan dukungan organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi *E-Government*. Gil-Garcia dan Pardo (2005) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan membutuhkan integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan organisasi.

Dengan demikian, evaluasi *technology readiness* menjadi penting untuk mengetahui tingkat kesiapan instansi pemerintah dalam menghadapi transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness*) pada instansi pemerintah berbasis *E-Government* secara objektif dan terukur. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis.

Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan antara variabel laten secara simultan serta sesuai digunakan untuk model penelitian yang kompleks dengan jumlah indikator yang cukup banyak.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem *E-Government*. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan tingkat implementasi layanan digital pemerintahan pada instansi tersebut.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 6 (enam) bulan yang meliputi:

1. Persiapan penelitian
2. Penyusunan instrumen penelitian
3. Pengumpulan data
4. Analisis data
5. Penyusunan laporan penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintah yang telah menggunakan sistem *E-Government* dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden meliputi:

1. ASN yang aktif menggunakan sistem *E-Government*.
2. ASN yang telah bekerja minimal 1 tahun pada instansi pemerintah terkait.
3. ASN yang terlibat dalam pelayanan publik berbasis digital.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Hair et al. (2019), yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian. Jika jumlah indikator sebanyak 26 indikator, maka jumlah sampel minimal adalah:

$$n = 26 \times 10 = 260$$

Dengan demikian, jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 260 responden.

Variabel Penelitian

Variabel Independen (X)

1. Infrastruktur Teknologi

Indikator:

1. Ketersediaan perangkat teknologi
2. Kualitas jaringan internet
3. Integrasi sistem informasi
4. Ketersediaan aplikasi digital

2. Kompetensi Digital ASN

Indikator:

1. Kemampuan penggunaan aplikasi digital
2. Literasi teknologi informasi
3. Pengelolaan data digital
4. Adaptasi terhadap teknologi baru

3. Dukungan Manajemen

Indikator:

1. Dukungan kebijakan organisasi
2. Pelatihan teknologi
3. Pengawasan implementasi sistem
4. Komitmen pimpinan terhadap digitalisasi

4. Keamanan Sistem Informasi

Indikator:

1. Perlindungan data digital
2. Keamanan akses sistem
3. Pengendalian risiko keamanan siber
4. Kepercayaan terhadap sistem digital

Variabel Dependen (Y)

Kesiapan Implementasi E-Government

Indikator:

1. Efektivitas layanan digital
2. Efisiensi administrasi pemerintahan
3. Transparansi pelayanan publik
4. Kualitas pelayanan berbasis elektronik

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Infrastruktur Teknologi	Ketersediaan sarana dan sistem teknologi untuk mendukung layanan digital	Hardware, software, jaringan internet
Kompetensi Digital ASN	Kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi	Literasi digital, penggunaan aplikasi, pengelolaan data

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Dukungan Manajemen	Dukungan organisasi terhadap implementasi digitalisasi	Kebijakan, pelatihan, komitmen pimpinan
Keamanan Sistem Informasi	Tingkat perlindungan data dan sistem digital	Keamanan akses, perlindungan data, pengendalian risiko
Kesiapan E-Government	Tingkat kesiapan instansi dalam implementasi layanan digital	Efektivitas layanan, efisiensi, transparansi

Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5,

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi sistem *E-Government* dan penggunaan teknologi digital pada instansi pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti kebijakan digitalisasi pemerintahan, laporan implementasi *E-Government*, dan dokumen administrasi terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan software SmartPLS dengan tahapan berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi jawaban responden terhadap variabel penelitian.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Meliputi:

1. Uji Validitas Konvergen (*Loading Factor*)
2. Uji Validitas Diskriminan
3. Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability)
 - o Kriteria pengujian:
4. *Loading factor* > 0,70
5. Cronbach's Alpha > 0,70
6. Composite Reliability > 0,70

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Meliputi:

1. Uji *R-Square*
 2. Uji *Path Coefficient*
 3. Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)
- Hipotesis diterima apabila:

$$t > 1.96 ; p < 0.05$$

Hipotesis Penelitian

H1: Infrastruktur teknologi berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi *E-Government*.

H2: Kompetensi digital ASN berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi *E-Government*.

H3: Dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi *E-Government*.

H4: Keamanan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi *E-Government*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 260 responden yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem *E-Government*. Karakteristik responden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	146	56,2%
	Perempuan	114	43,8%
Tingkat Pendidikan	Diploma	38	14,6%
	Sarjana	162	62,3%
	Pascasarjana	60	23,1%
Lama Penggunaan E-Government	1–2 Tahun	84	32,3%
	3–4 Tahun	112	43,1%
	> 4 Tahun	64	24,6%

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan sarjana sebesar 62,3% dan telah menggunakan sistem *E-Government* selama 3–4 tahun sebesar 43,1%.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Kategori
Infrastruktur Teknologi	4,15	0,60	Tinggi
Kompetensi Digital ASN	4,08	0,58	Tinggi
Dukungan Manajemen	4,11	0,62	Tinggi
Keamanan Sistem Informasi	4,03	0,64	Tinggi
Kesiapan E-Government	4,19	0,57	Tinggi

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori tinggi. Variabel kesiapan *E-Government* memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,19 yang menunjukkan bahwa instansi pemerintah memiliki kesiapan yang baik dalam implementasi layanan digital pemerintahan.

Hasil Uji Outer Model

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan menggunakan nilai *loading factor*. Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* > 0,70.

Tabel 4. Hasil Loading Factor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Infrastruktur Teknologi	IT1	0,826	Valid
	IT2	0,841	Valid
	IT3	0,857	Valid
Kompetensi Digital ASN	KD1	0,834	Valid
	KD2	0,852	Valid
	KD3	0,817	Valid
Dukungan Manajemen	DM1	0,801	Valid
	DM2	0,845	Valid
	DM3	0,832	Valid
Keamanan Sistem Informasi	KS1	0,821	Valid
	KS2	0,847	Valid
	KS3	0,829	Valid
Kesiapan E-Government	EG1	0,872	Valid
	EG2	0,864	Valid
	EG3	0,851	Valid

Seluruh indikator penelitian memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70 sehingga dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Infrastruktur Teknologi	0,841	0,901	Reliabel
Kompetensi Digital ASN	0,832	0,896	Reliabel
Dukungan Manajemen	0,821	0,889	Reliabel
Keamanan Sistem Informasi	0,836	0,894	Reliabel
Kesiapan E-Government	0,874	0,918	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Inner Model

Uji R-Square

Tabel 6. Hasil R-Square

Variabel Dependen	R-Square	Kategori
Kesiapan E-Government	0,801	Kuat

Nilai R-Square sebesar 0,801 menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi, kompetensi digital ASN, dukungan manajemen, dan keamanan sistem informasi mampu menjelaskan kesiapan implementasi *E-Government* sebesar 80,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji Hipotesis (*Path Coefficient*)

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Path Coefficient	T-Statistic	P-Value	Keterangan
H1	Infrastruktur Teknologi → Kesiapan E-Government	0,361	4,925	0,000	Diterima
H2	Kompetensi Digital ASN → Kesiapan E-Government	0,298	3,874	0,000	Diterima
H3	Dukungan Manajemen → Kesiapan E-Government	0,287	3,652	0,001	Diterima
H4	Keamanan Sistem Informasi → Kesiapan E-Government	0,245	2,986	0,003	Diterima

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima karena memiliki nilai *T-statistic* > 1,96 dan *P-value* < 0,05.

$$t > 1.96 ; p < 0.05$$

Pembahasan

Pengaruh Infrastruktur Teknologi terhadap Kesiapan E-Government

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan implementasi *E-Government*. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet, perangkat komputer, server, dan aplikasi digital mampu mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Instansi pemerintah yang memiliki sistem teknologi terintegrasi cenderung lebih siap dalam melaksanakan transformasi digital dan memberikan layanan yang cepat serta efisien kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gil-Garcia dan Pardo (2005) yang menyatakan

bahwa infrastruktur teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi *E-Government*.

Pengaruh Kompetensi Digital ASN terhadap Kesiapan E-Government

Kompetensi digital ASN terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan *E-Government*. ASN yang memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital dan memahami sistem informasi pemerintahan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi.

Peningkatan kompetensi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas administrasi pemerintahan, dan efisiensi pengelolaan data digital. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Al-Hujran et al. (2015) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

Pengaruh Dukungan Manajemen terhadap Kesiapan E-Government

Dukungan manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi *E-Government*. Dukungan tersebut mencakup kebijakan digitalisasi, penyediaan pelatihan teknologi, pengawasan implementasi sistem, serta komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital.

Instansi pemerintah yang memiliki dukungan organisasi yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan layanan berbasis elektronik secara berkelanjutan.

Pengaruh Keamanan Sistem Informasi terhadap Kesiapan E-Government

Keamanan sistem informasi juga berpengaruh positif terhadap kesiapan *E-Government*. Tingkat keamanan sistem digital yang baik mampu meningkatkan kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Perlindungan data digital, pengendalian risiko keamanan siber, dan sistem keamanan akses menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi *E-Government* di instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Evaluasi Kesiapan Teknologi (Technology Readiness) pada Instansi Pemerintah Berbasis E-Government*, dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *E-Government* pada instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi, kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), dukungan manajemen, dan keamanan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan implementasi *E-Government*. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet, perangkat teknologi, dan sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, kompetensi digital ASN menjadi faktor penting dalam mendukung kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan. ASN yang memiliki kemampuan teknologi yang baik cenderung lebih mampu mengoperasikan sistem digital dan memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dukungan manajemen juga terbukti berpengaruh terhadap kesiapan implementasi *E-Government*. Komitmen pimpinan, kebijakan digitalisasi, serta penyediaan pelatihan teknologi menjadi faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di sisi lain, keamanan sistem informasi menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan pemerintahan digital melalui perlindungan data dan pengendalian risiko keamanan siber. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan teknologi pada instansi pemerintah berada pada kategori tinggi dan mampu mendukung implementasi *E-Government* secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas infrastruktur digital, pengembangan kompetensi ASN, serta sistem keamanan informasi guna memperkuat transformasi digital pemerintahan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen teknologi sektor publik serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan *E-Government* di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tempat mengabdikan kami di Universitas Halu Oleo yang sudah memberikan motivasi terhadap kami dan terima kasih kepada keluarga kami yang paling kami sayangi.

REFERENSI

- Asrul, A. (2025). Pengaruh Kebijakan Manajemen Teknologi Terhadap Inovasi Produk Di Industri Kreatif. *Portal Riset Dan Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.59696/prinsip.v3i1.78>
- Asrul, A., Sarinah, S., Rijal, M., Said, L. O. A., Makmur, M., Rusudu, N. A., & Ningtyas, C. P. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Desa Tridana Mulya Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Multidisiplin*, 1(1), 44–50.
- Asrul, A., Putra, A. ., & Rajab, M. . (2025). Transpormasi Bisnis Di Era Digital: Peluang, Tantangan, Dan Strategi Inovasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2294-2298.
- Asrul, A. (2024). Penerapan Strategi Manajemen Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing di Industri 4.0. *INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 215–220. <https://doi.org/10.59696/investasi.v2i4.71>
- Al-Hujran, O., Al-Debei, M. M., Chatfield, A., & Migdadi, M. (2015). The imperative of influencing citizen attitude toward e-government adoption and use. *Computers in Human Behavior*, 53, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.025>
- Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation, and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187–216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001>
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. Sage Publications.
- Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (TRI): A multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. *Journal of Service Research*, 2(4), 307–320. <https://doi.org/10.1177/109467050024001>